

## Dinamika Butterfly Effect dalam Proses Pembuatan Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

### *The Dynamics of the Butterfly Effect in the Indonesian House of Representatives' Policy-Making Process*

Muhammad Ananda Denny Ferdian<sup>1\*</sup>, Taufiq Nugroho<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>c100210313@student.ums.id, <sup>2</sup>tn272@ums.ac.id

\*Corresponding Author

[Received: January 4, 2025] [Accepted: January 30, 2025] [Published: January 31, 2025]

#### How to Cite:

Ferdian, Muhammad Ananda Denny, and Taufiq Nugroho. 2025. "The Dynamics of the Butterfly Effect in the Indonesian House of Representatives' Policy-Making Process". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6 (1), 99-115. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.54581>.

#### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena Butterfly Effect dalam kebijakan yang diambil oleh DPR di Indonesia. Konsep Butterfly Effect yang berasal dari chaos theory menggambarkan bagaimana perubahan sekecil apa pun pada kondisi awal dapat berdampak besar dan tidak terduga di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap beberapa kebijakan DPR dalam periode terakhir. Sumber data terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data-data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota DPR, analisis dokumen, serta studi pustaka seperti buku-buku, dokumen, arsip, dan bahan-bahan terkait yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode triangulasi data untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan kecil, seperti perubahan anggaran atau pembahasan Undang-Undang, dapat berdampak dinamis dan berjangka panjang, baik terhadap masyarakat maupun sistem politik. Dalam konteks Butterfly Effect, kebijakan yang tampak sepele pada awalnya dapat memicu rangkaian konsekuensi yang tidak terduga di masa mendatang. Misalnya, keterlambatan pengesahan suatu Undang-Undang dapat memicu ketidakpuasan publik yang berpotensi berkembang menjadi gerakan sosial. Selain itu, perubahan kebijakan anggaran juga berdampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk investasi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini lebih lanjut menemukan bahwa komunikasi antara anggota DPR dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran dalam memperbesar atau memperkecil dampak suatu kebijakan. Komunikasi yang terbuka dan efektif dapat membantu meredam resistensi terhadap kebijakan baru serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Kompleksitas sistem politik dalam perspektif Butterfly Effect dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berkualitas jika dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, DPR diharapkan lebih cermat dalam merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak jangka panjang dan tidak hanya berfokus pada tujuan jangka pendek semata.

**Kata kunci:** Butterfly Effect; Kebijakan; Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Abstract

*The factor that influenced this article is the phenomenon of the Butterfly Effect given to the policies taken by the House of Representatives in Indonesia. The concept of the Butterfly Effect, which comes from the chaos theory, describes how the slightest change in the initial conditions*

*will have a big and big impact later on. This study uses a qualitative approach, with case study analysis of several policies taken in the last period of the House of Representatives. Data was collected through interviews with members of the House of Representatives, analysis of documents, and studies of related literature. The findings of this study show that even small decisions regarding changes in budgeting or discussion of laws can have dynamic and long-term consequences both on society and the political system. For example, a delay in the promulgation of a law can cause dissatisfaction among the community, who may have started a social movement; Changes in budget policy also have an impact on various sectors of the economy. The study further found that communication between members of the House of Representatives and other stakeholders serves to magnify or minimize the impact of the policies taken. The fact that the political system is complex when viewed from the Butterfly Effect can result in better quality policy outputs and, thus, have a greater impact on society. It is hoped that the House of Representatives will be more careful in formulating policies by paying attention to the impact or long-term consequences of an action, optimizing the decisions taken by the leadership in the best interests of the community.*

**Keywords:** *Butterly Effect; Policy; House of Representatives.*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif mempunyai peran penting dalam membuat kebijakan atau peraturan negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Untuk memandang suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Republik Indonesia sebagai Lembaga legislatif Indonesia, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memainkan peran sentral dalam sistem pemerintahan negara.<sup>2</sup> Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang mengutamakan partisipasi masyarakat melalui perwakilan politik. DPR bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang, menyusun anggaran negara, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, DPR bukan hanya sebagai lembaga legislasi, tetapi juga sebagai representasi aspirasi rakyat.

Pentingnya lembaga legislatif dalam sebuah negara demokratis tidak dapat dipandang sebelah mata. DPR, yang terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang akuntabel dan responsif antara pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup> Namun, perjalanan DPR tidak selalu mulus sejak era reformasi pada tahun 1998, banyak tantangan yang dihadapi seperti kebijakan yang tidak sesuai dengan dinamika

---

<sup>1</sup> Ady Supryadi, "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 491–95, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.

<sup>2</sup> I Gede Sujana, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 7–13, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.41>.

<sup>3</sup> Veri Junaidi and Viola Reininda, "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai," *Jurnal JENTERA* 3, no. 1 (2020): 216–39, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.

<sup>4</sup> Benito Asdhie Kodiyat, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>.

negara. Isu ini sering kali menciptakan skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap kapasitas DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya. sebagai fenomena yang rentan terhadap efek-efek kecil yang dapat mempengaruhi skala dan prevalensinya secara signifi *Butterfly effect* mengingatkan kita untuk selalu bijak dalam membuat keputusan.<sup>5</sup> Selalu memilih hal baik dan cara yang baik dalam setiap langkah.

Teori *Butterfly effect* percaya bahwa setiap perbuatan kecil dapat mengakibatkan perubahan besar, bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada seluruh lingkungan sekitar kita.<sup>6</sup> Dengan demikian, Setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan mempunyai dampak tersendiri, kebijakan yang diputuskan sesuai dengan musyawarah yang dilakukan oleh Anggota Legislatif mengandung hukum positif.<sup>7</sup> Namun tidak ada kebijakan atau keputusan yang sempurna, semua kebijakan harus memiliki fungsi dan manfaat yang berlaku. Penelitian ini sebelumnya memiliki sumber dari Jurnal Butterfly Effect oleh Edward Norton tahun 1961.

Pengaruh *butterfly effect* dalam konteks DPR Indonesia juga terlihat dalam bagaimana kebijakan tertentu dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial. Misalnya, keputusan mengenai kebijakan ekonomi yang tidak populer bisa menyebabkan ketidakpuasan masyarakat yang meluas, yang kemudian dapat berujung pada perubahan sikap politik, penguatan gerakan oposisi, atau bahkan kerusuhan. Di sisi lain, kebijakan yang responsif dan inklusif bisa memperkuat legitimasi DPR dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan dapat saling memengaruhi, diharapkan DPR dapat mengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi saat ini, tetapi juga dampak jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, DPR dapat berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Konsep *Butterfly effect* dapat memberikan pandangan baru dalam memahami dinamika hal hal kecil bisa membawa perubahan yang besar, di mana perubahan kecil dalam berbagai faktor seperti regulasi, transparansi, atau rancangan perundang undangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Teori

---

<sup>5</sup> Arifuddin Nurdin, "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 53–76, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.

<sup>6</sup> R.A. Pielke, Bo-Wen Shen, and Xubin Zeng, "The Butterfly Effect: Can a Butterfly in Brazil Really Cause a Tornado in Texas?," *Weatherwise* 77, no. 3 (2024): 14–18, <https://doi.org/10.1080/00431672.2024.2329521>.

<sup>7</sup> Kevin J. Dooley, "The Butterfly Effect of the 'Butterfly Effect,'" *Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences* 13, no. 3 (2009): 279–88, <https://asu.elsevierpure.com/en/publications/the-butterfly-effect-of-the-butterfly-effect>.

*Butterfly effect* menjelaskan dampak signifikan yang diakibatkan oleh Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>8</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Butterfly Effect* dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dampak peristiwa kecil atau perubahan minor dalam sistem yang kompleks dapat memberikan konsekuensi besar terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi pola-pola hubungan sebab-akibat dalam konteks pembuatan kebijakan yang melibatkan aktor politik, tekanan publik, dan variabel eksternal lainnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis pengaruh *Butterfly Effect* dalam kebijakan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Fokus penelitian adalah pada dinamika pembuatan kebijakan dan pola-pola yang muncul dari kebijakan yang diterapkan, meskipun dampaknya sulit diprediksi pada awalnya. Pendekatan studi kasus dipilih untuk menganalisis kebijakan tertentu yang diambil DPR RI dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu *Butterfly Effect* dalam kebijakan publik. Sumber data mencakup kebijakan ekonomi, sosial, dan politik yang diambil oleh DPR dalam 5 tahun terakhir, yang diperkirakan dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Data sekunder dari bahan hukum primer disusun sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang dampak yang tidak terduga dari kebijakan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. *Butterfly Effects* Secara Garis Besar

Efek kupu-kupu, atau yang dikenal dengan istilah "*butterfly effect*," adalah konsep dalam teori sistem dinamis yang menyatakan bahwa sebuah perubahan kecil pada suatu tempat dalam suatu sistem yang kompleks dapat memiliki dampak yang signifikan pada tempat lain di dalam sistem tersebut.<sup>9</sup> Istilah ini pertama kali diusulkan oleh ilmuwan Edward Lorenz pada tahun 1960-an ketika ia melakukan penelitian tentang prediksi cuaca

---

<sup>8</sup> Gunawan Santoso et al., "Butterfly Effect : Satu Hal Kecil Yang Merubah Hidup Sepenuhnya," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 3 (2023): 1–4, <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i3.534>.

<sup>9</sup> Faliha Muthmainah, "Konsep *Butterfly Effect* Dalam Psikologi Positif," *Flourishing Journal* 2, no. 10 (2023): 656–62, <https://doi.org/10.17977/um070v2i102022p656-662>.

menggunakan model matematika. Konsep ini diilustrasikan dengan analogi bahwa getaran kecil yang dihasilkan oleh ketukan sayap seekor kupu-kupu di Brasil bisa memicu serangkaian perubahan yang menyebabkan badai di Texas beberapa minggu kemudian. Meskipun analogi ini sederhana, ia menggambarkan prinsip bahwa sistem yang kompleks dan sensitif terhadap kondisi awalnya dapat mengalami perubahan yang drastis akibat perubahan kecil yang tidak terduga.<sup>10</sup>

Efek kupu-kupu mengacu pada sifat kepekaan sistem non-linear terhadap kondisi awalnya. Ini berarti bahwa dalam sistem yang tidak beraturan atau tidak linier, seperti cuaca, ekonomi, ekologi, atau bahkan perilaku sosial manusia, perubahan kecil dalam faktor-faktor awal dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda dari yang diprediksi atau diharapkan. Penelitian lanjutan telah menunjukkan bahwa efek kupu-kupu bukan hanya fenomena teoretis, tetapi memang ada dalam berbagai sistem dunia nyata. Misalnya, dalam ilmu meteorologi, perubahan kecil dalam suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dapat mempengaruhi pola cuaca El Niño di seluruh dunia, yang memiliki dampak besar pada iklim regional dan global.<sup>11</sup>

Di bidang ekonomi, keputusan kecil yang dibuat oleh individu atau perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada pasar global atau pada keseimbangan ekonomi suatu negara. Contohnya adalah perubahan dalam tingkat suku bunga atau kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral suatu negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan stabilitas pasar keuangan. Efek kupu-kupu juga relevan dalam ekologi dan lingkungan, di mana perubahan kecil dalam ekosistem seperti peningkatan atau penurunan populasi spesies tertentu dapat memicu efek domino yang berdampak pada keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, atau bahkan perubahan iklim regional. Dalam konteks sosial dan perilaku manusia, kejadian atau keputusan kecil yang terjadi di satu tempat dapat memicu perubahan sosial yang besar. Contohnya adalah protes atau gerakan sosial yang dimulai oleh sekelompok kecil individu tetapi akhirnya dapat mempengaruhi opini publik secara luas atau memicu perubahan kebijakan pemerintah.

Namun, meskipun efek kupu-kupu sering kali dianggap sebagai sumber ketidakpastian dan kompleksitas dalam sistem, ada juga batasan pada teori ini. Beberapa kritikus berpendapat bahwa tidak semua perubahan kecil akan memiliki dampak yang besar, dan bahwa dalam beberapa kasus, sistem dapat memiliki mekanisme pengaturan atau damping

---

<sup>10</sup> Dooley, "The Butterfly Effect of the 'Butterfly Effect.'"

<sup>11</sup> Pielke, Shen, and Zeng, "The Butterfly Effect: Can a Butterfly in Brazil Really Cause a Tornado in Texas?"

yang mengurangi efek dari perubahan kecil. Dengan demikian, efek kupu-kupu mencerminkan pentingnya memahami keterkaitan dan interdependensi dalam sistem yang kompleks. Penggunaan konsep ini telah meluas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan sebagai alat untuk memahami dan mengelola dampak dari perubahan kecil dalam sistem yang kompleks dan saling terkait.

## **2. Pengaruh Kebijakan DPR dengan Pendekatan Teori *Butterfly effect***

Dalam pendekatan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), teori ini dapat memberikan perspektif yang menarik mengenai bagaimana keputusan-keputusan kecil dapat memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat dan negara. Setiap kebijakan yang dihasilkan oleh DPR<sup>12</sup>, meskipun tampaknya sederhana, memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang jauh melampaui tujuan awalnya. Misalnya, ketika DPR mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan, dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.<sup>13</sup> Meningkatnya kualitas pendidikan dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks lingkungan, kebijakan yang dikeluarkan DPR mengenai perlindungan hutan dapat memiliki efek domino yang signifikan. Dengan melindungi area hutan, tidak hanya flora dan fauna yang terlindungi, tetapi juga masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Keputusan untuk melestarikan hutan dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem, yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup di bumi. Namun, kebijakan yang buruk juga dapat memiliki konsekuensi yang merugikan. Misalnya, jika DPR mengesahkan kebijakan yang menguntungkan satu sektor industri tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah. Kerusakan ini dapat memicu bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor, yang berakibat pada kehilangan harta benda dan nyawa. Dalam hal ini, keputusan kecil di tingkat legislatif dapat berujung pada tragedi yang besar dan meluas.

Pengaruh kebijakan DPR juga dapat dilihat dari segi sosial. Kebijakan tentang perlindungan hak asasi manusia, misalnya, dapat membawa dampak positif yang signifikan.

---

<sup>12</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.

<sup>13</sup> Jastin Nurul Inayah and Taufiq Nugroho, "Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 252, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>.

Ketika DPR mengesahkan Undang-Undang yang melindungi hak minoritas, hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Seiring berjalannya waktu, perubahan sikap ini dapat mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.<sup>14</sup> Di sisi lain, kebijakan yang kontroversial dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketika DPR mengeluarkan regulasi yang dianggap merugikan, misalnya, ini dapat memicu protes dan gerakan sosial. Keterlibatan masyarakat dalam aksi protes ini tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan, tetapi juga dapat memicu perubahan lebih lanjut di tingkat legislatif. Ini menunjukkan bagaimana satu keputusan DPR dapat menciptakan gelombang reaksi yang meluas, yang akhirnya dapat mendorong reformasi.<sup>15</sup>

Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi yang cepat juga berperan penting dalam memperkuat efek dari kebijakan DPR. Dengan media sosial dan platform komunikasi lainnya, reaksi masyarakat terhadap kebijakan dapat tersebar dengan cepat, mengubah opini publik dan memengaruhi keputusan politik. Sebuah kebijakan yang dianggap merugikan dapat menjadi viral, mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi dan mendesak DPR untuk melakukan perubahan. Kebijakan yang dikeluarkan DPR juga mempengaruhi hubungan internasional. Misalnya, kebijakan luar negeri yang proaktif dapat memperkuat posisi negara di mata dunia, membuka peluang kerjasama yang lebih luas, dan meningkatkan investasi asing. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu nasionalis atau diskriminatif dapat menyebabkan isolasi internasional, yang berdampak pada perekonomian dan stabilitas politik.<sup>16</sup>

Pengaruh kebijakan DPR sangat kompleks dan tidak dapat diremehkan. Setiap keputusan memiliki potensi untuk memicu serangkaian reaksi yang dapat berujung pada perubahan yang besar. Dalam konteks ini, penting bagi anggota DPR untuk mempertimbangkan tidak hanya dampak langsung dari kebijakan yang mereka buat, tetapi juga konsekuensi jangka panjang yang mungkin muncul. Melalui pendekatan teori *butterfly effect*, kita dapat memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, dapat memiliki dampak

---

<sup>14</sup> Sylvia Febrina and Lisman Manurung, "Penerapan E-Parlemen Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8, no. 2 (2022): 169–82, <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556>.

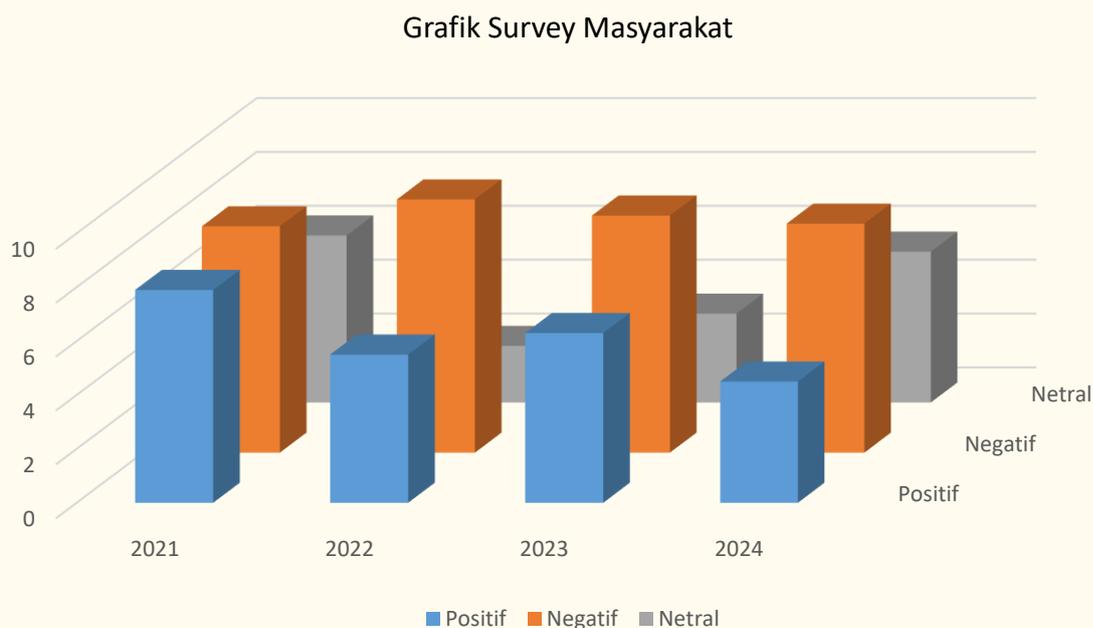
<sup>15</sup> Joko Riskiyono, "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

<sup>16</sup> Junaidi and Reininda, "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai."

yang signifikan.<sup>17</sup> Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam proses pembuatan kebijakan, penting untuk melibatkan berbagai stakeholder dan mendengarkan suara masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat yang optimal. Dengan demikian, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah dan masa depan negara, dan setiap keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan seksama.

### 3. Respon Masyarakat

Respons masyarakat terhadap kebijakan yang diambil DPR juga dapat menciptakan *butterfly effect*. Misalnya, jika masyarakat merasa terabaikan oleh kebijakan tertentu, mereka dapat melakukan protes atau gerakan sosial yang, meskipun dimulai dari isu kecil, dapat memengaruhi kebijakan di tingkat Nasional. Hal ini tercermin dalam banyak gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan publik, yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislative.<sup>18</sup>



Penulis telah melakukan survey terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Korespondensi dan Wawancara. Dengan melihat grafik penelitian tersebut penelitian DPR memasukkan 95 tweet positif dengan polaritas 0,75 atau 75% sentimen positif, 693 tweet netral dengan polaritas 0,79 atau 79% sentimen netral, dan tweet negatif dengan polaritas 0,82 atau 82% sentimen negatif. Sentimen Positif menerima

<sup>17</sup> Faliha Muthmainah, "Konsep Butterfly Effect Dalam Psikologi Positif."

<sup>18</sup> Sultan Agung et al., "Menggali Asprasi Generasi Z : Persepsi Generasi Z Terhadap Citra Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )" 2, no. 01 (2024): 55–64, <https://doi.org/10.58812/sish.v2.i01>.

peringkat akurasi 0,8 atau 80 berdasarkan hingga 20% data pengujian. Dengan penelitian tersebut membuktikan bahwa hampir masyarakat kebijakan dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tidak relevan dengan dinamika negara Indonesia.<sup>19</sup> Sehingga data yang dikorelasikan menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempertimbangkan *Butterfly effect* yang terjadi.

#### 4. Pengaruh Eksternal dan Globalisasi

Globalisasi dan pengaruh eksternal juga berperan dalam dinamika korupsi di Indonesia. Tekanan dari komunitas internasional dan lembaga donor untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat memicu perubahan kecil yang berujung pada efek yang lebih besar.<sup>20</sup> Misalnya, partisipasi Indonesia dalam konvensi internasional anti-korupsi dan kerja sama dengan lembaga anti-korupsi internasional dapat mendorong reformasi internal yang signifikan. Selain itu, integrasi ekonomi global membuat perusahaan multinasional harus mematuhi standar anti-korupsi internasional yang ketat. Ini berarti bahwa praktek-praktek korupsi di tingkat lokal dapat terdeteksi dan dihukum lebih cepat melalui jalur internasional. Sebagai contoh, kasus korupsi yang melibatkan perusahaan asing dapat menarik perhatian media internasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tekanan domestik untuk reformasi anti-korupsi.<sup>21</sup>

#### 5. Pentingnya Reformasi Hukum dan Institusi

Reformasi hukum dan institusi adalah aspek krusial dalam memerangi korupsi. Perubahan kecil dalam peraturan hukum, seperti peningkatan hukuman untuk tindak pidana korupsi atau pemberlakuan undang-undang baru yang memperketat pengawasan terhadap pejabat publik, dapat memiliki dampak besar. Efektivitas institusi penegak hukum juga penting; lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian harus memiliki sumber daya yang memadai dan kebebasan dari intervensi politik untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Perubahan struktural dalam lembaga pemerintahan, seperti desentralisasi dan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, juga bisa menghasilkan efek yang signifikan. Desentralisasi dapat mengurangi konsentrasi kekuasaan yang sering kali menjadi

---

<sup>19</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014).

<sup>20</sup> Tatar Bonar Silitonga, "Tantangan Globalisasi, Peran Negara, Dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 1 (2020): 15–28, <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271>.

<sup>21</sup> Laurensius S Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi)* 11, no. 1 (2019): 1–20.

sumber korupsi, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat di tingkat lokal untuk mencegah munculnya korupsi di tingkat daerah.<sup>22</sup>

## **6. Penerapan Konsep *Butterfly effect***

Konsep *butterfly effect* berasal dari teori chaos yang menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam sistem dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Dalam konteks kebijakan publik, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, *butterfly effect* mengilustrasikan bagaimana keputusan-keputusan kecil dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar. Misalnya, peningkatan pajak pada sektor tertentu mungkin tampak sebagai langkah sederhana, tetapi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan konsumsi, yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>23</sup> Dalam proses perumusan kebijakan di DPR, dinamika politik sering kali berperan penting. Contoh nyata terlihat dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, di mana keputusan untuk mengakomodasi beberapa aspirasi buruh berujung pada protes besar-besaran dari kelompok yang merasa dirugikan (Salim, 2020). Protes tersebut menjadi manifestasi dari *butterfly effect*, di mana keputusan kecil dalam satu sesi dapat menciptakan dampak sosial yang luas.<sup>24</sup>

Kebijakan lingkungan merupakan area lain di mana *butterfly effect* dapat dilihat. Ketika DPR memutuskan untuk memperlonggar regulasi penebangan hutan, keputusan ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Dalam hal ini, dampak dari keputusan kecil dapat berujung pada krisis ekologis yang meluas. Sementara itu, dalam konteks kebijakan kesehatan, keputusan DPR untuk meningkatkan anggaran kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dapat menghasilkan dampak besar pada sistem kesehatan. Peningkatan alokasi anggaran dapat memperbaiki fasilitas kesehatan dan kualitas layanan, yang akhirnya mengurangi angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang tampaknya sederhana dapat memiliki efek domino yang signifikan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Nurdin, "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah."

<sup>23</sup> Jizhao Liu et al., "The Butterfly Effect in Primary Visual Cortex," *IEEE Transactions on Computers* 71, no. 11 (2022): 2803–15, <https://doi.org/10.1109/TC.2022.3173080>.

<sup>24</sup> Santoso et al., "Butterfly Effect : Satu Hal Kecil Yang Merubah Hidup Sepenuhnya."

<sup>25</sup> Humiati, "Peran Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Huku* 4, no. 2 (2022): 223–39, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i2.82>.

Kebijakan pendidikan di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk karakter masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu aspek yang menonjol dalam kebijakan ini adalah penerapan program pendidikan inklusif, yang dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Penerapan program ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hanya memengaruhi siswa secara individual, tetapi juga menciptakan perubahan signifikan dalam dinamika sosial di lingkungan sekolah. Program pendidikan inklusif membantu membangun kesadaran dan empati di antara mereka, mengurangi stigma, serta mendorong sikap toleran. Pendidikan inklusif terletak pada kemampuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang beragam. Ketika siswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan belajar bersama, mereka belajar untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama. Hal ini berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan di masyarakat. Dalam jangka panjang, dampak positif dari lingkungan yang inklusif ini dapat terlihat dalam cara individu berinteraksi satu sama lain di luar sekolah, menghasilkan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghargai. Namun, penerapan kebijakan pendidikan inklusif tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam melaksanakan program ini mencakup kurangnya pelatihan bagi guru, keterbatasan sumber daya, dan infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus.

Tantangan ini dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan program, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut. DPR perlu melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua lembaga pendidikan memiliki kapasitas yang diperlukan untuk menerapkan pendidikan inklusif secara efektif. Penerapan pendidikan inklusif juga dapat memengaruhi kebijakan pendidikan lainnya. Ketika lingkungan sekolah menjadi lebih inklusif, akan ada permintaan untuk kurikulum yang lebih fleksibel dan beragam. Hal ini mendorong lembaga pendidikan untuk mengadaptasi metode pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa, bukan hanya sebagian besar populasi. Proses adaptasi ini merupakan manifestasi dari *butterfly effect*, di mana perubahan kecil dalam satu area kebijakan dapat mengarah pada perubahan yang lebih besar dalam kebijakan pendidikan secara keseluruhan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mohammad Rifqi Aziz, "Peran Dan Implementasi Dpr Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1308>.

Namun, dalam situasi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998, kebijakan pendidikan inklusif dapat menghadapi tantangan tambahan. Dalam krisis tersebut, banyak program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, mengalami pemotongan anggaran. Hal ini berpotensi menghambat implementasi pendidikan inklusif yang membutuhkan investasi tambahan dalam pelatihan guru dan fasilitas. Dampak dari keputusan-keputusan kecil ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan dan memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan, terutama bagi kelompok rentan. DPR harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil dalam kebijakan pendidikan. Ketidakstabilan yang dihasilkan dari kebijakan yang tidak terencana dapat mengarah pada konsekuensi sosial yang serius, termasuk meningkatnya angka putus sekolah dan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif, jika dilaksanakan dengan baik, dapat membantu mengurangi kesenjangan ini dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil. Kebijakan pendidikan inklusif menunjukkan bagaimana efek butterfly effect beroperasi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Keputusan yang diambil oleh DPR untuk menerapkan program pendidikan inklusif tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat menghasilkan perubahan sosial yang luas.<sup>27</sup>

Kebijakan energi juga mencerminkan efek *butterfly effect*. Ketika DPR mengurangi subsidi bahan bakar, keputusan ini dapat memicu inflasi dan meningkatkan biaya hidup, berujung pada potensi kerusuhan sosial. Kenaikan harga energi sering kali menghasilkan reaksi cepat dari masyarakat, termasuk protes. Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, DPR Indonesia juga menunjukkan bagaimana keputusan kecil dapat menghasilkan dampak besar. Ratifikasi kesepakatan internasional seperti Paris Agreement mungkin tampak sebagai langkah kecil, tetapi dapat memicu perubahan signifikan dalam kebijakan energi dan pertanian. Misalnya, pengembangan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang pada gilirannya mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberikan dampak positif jangka panjang pada kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencerminkan bagaimana fenomena butterfly effect dapat terjadi dalam konteks politik dan sosial. Salah satu contoh yang relevan adalah pemotongan anggaran untuk program sosial yang seringkali menjadi kebijakan yang tidak populer. Kebijakan semacam ini

---

<sup>27</sup> Junaidi and Reininda, "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai."

tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat memicu reaksi yang lebih besar, seperti demonstrasi.<sup>28</sup>

Demonstrasi ini adalah manifestasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan yang dianggap merugikan, dan efek ini dapat menyebar dengan cepat, menciptakan gelombang protes yang dapat memengaruhi stabilitas politik di tingkat lokal maupun nasional. Ketidakpuasan ini bisa berujung pada perubahan dalam pola pemungutan suara pada pemilu berikutnya, di mana pemilih cenderung memberikan suara kepada kandidat atau partai politik yang menjanjikan perubahan dan pemulihan atas kebijakan yang merugikan tersebut. Dampak dari kebijakan yang diambil DPR dapat menjangkau lebih dalam ke dalam struktur sosial dan politik masyarakat. Misalnya, kebijakan antikorupsi yang diterapkan oleh DPR, meskipun tampak sepele dalam konteks keputusan sehari-hari, dapat membawa perubahan yang signifikan dalam jangka panjang.

Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik akan mengurangi tingkat korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat mulai melihat hasil positif dari kebijakan antikorupsi ini, mereka menjadi lebih percaya bahwa pemerintah dapat berfungsi dengan baik dan adil. Kepercayaan ini berpotensi memicu partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses demokrasi, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum atau terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Keterlibatan yang lebih aktif ini tidak hanya menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap politik, tetapi juga menghasilkan perubahan dalam perilaku pemilih yang lebih kritis. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dampak dari kebijakan yang diambil oleh DPR nyata, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memengaruhi keputusan politik. Dengan kata lain, efek dari kebijakan yang positif, seperti antikorupsi, dapat menciptakan siklus umpan balik yang memperkuat keterlibatan politik dan meningkatkan stabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan kecil dalam kebijakan dapat memiliki implikasi besar bagi dinamika sosial dan politik, menjadikannya sebagai contoh klasik dari butterfly effect dalam praktik. Jika DPR terus menerapkan kebijakan seperti Kebijakan RUU Omnibuslaw yang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat, maka akan muncul penolakan yang lebih

---

<sup>28</sup> Anggreany Arief and Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–20, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.

besar dari masyarakat dan memang terjadi Demonstrasi besar besaran.<sup>29</sup> Penolakan ini dapat mengarah pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi politik secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan ini dapat merambat ke area lain, seperti pengurangan investasi asing dan terganggunya perkembangan ekonomi, yang semuanya berakar dari keputusan kebijakan yang tidak populer. Ini adalah ilustrasi bagaimana satu keputusan kebijakan dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dan mendalam, menggarisbawahi pentingnya pertimbangan yang matang dalam setiap keputusan yang diambil oleh DPR.

*Butterfly effect* memainkan peran krusial dalam kebijakan yang diambil oleh DPR Indonesia. Keputusan kecil dapat memiliki konsekuensi besar di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, maupun politik. DPR wajib untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diusulkan. Anggota DPR dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memahami fenomena *butterfly effect*.<sup>30</sup> Dampak dari kebijakan yang diambil DPR dapat menjangkau lebih dalam ke dalam struktur sosial dan politik masyarakat. Misalnya, kebijakan antikorupsi yang diterapkan oleh DPR, meskipun tampak sepele dalam konteks keputusan sehari-hari, dapat membawa perubahan yang signifikan dalam jangka panjang.

Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik akan mengurangi tingkat korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat mulai melihat hasil positif dari kebijakan antikorupsi ini, mereka menjadi lebih percaya bahwa pemerintah dapat berfungsi dengan baik dan adil.<sup>31</sup> Kepercayaan ini berpotensi memicu partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses demokrasi, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum atau terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Keterlibatan yang lebih aktif ini tidak hanya menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap politik, tetapi juga menghasilkan perubahan dalam perilaku pemilih yang lebih kritis. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dampak dari kebijakan yang diambil oleh DPR nyata, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memengaruhi keputusan politik.

---

<sup>29</sup> Muchammad Abdul Ghofur et al., "Demonstrasi Mahasiswa 'Tolak Reformasi Dikorupsi' Dalam Agenda Media Tirto.Id," *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah* 11, no. 1 (2021): 13–28, <https://doi.org/10.35905/komunida.v11i01>.

<sup>30</sup> Santoso et al., "Butterfly Effect : Satu Hal Kecil Yang Merubah Hidup Sepenuhnya."

<sup>31</sup> Silitonga, "Tantangan Globalisasi, Peran Negara, Dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara."

## Kesimpulan

Penerapan konsep *butterfly effect* dalam kebijakan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak dari keputusan kecil yang diambil dalam konteks legislatif. Seperti yang telah dijelaskan, keputusan yang tampaknya sederhana—seperti perubahan regulasi lingkungan atau revisi kurikulum pendidikan—dapat memicu efek domino yang luas dan tak terduga dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diusulkan harus diperhatikan secara seksama, dengan analisis menyeluruh tentang potensi dampaknya. Kebijakan publik seringkali beroperasi dalam sistem yang kompleks, di mana interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Misalnya, perubahan dalam subsidi pertanian tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga pada konsumen, pedagang, dan sektor ekonomi lainnya. Respons masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan *butterfly effect*. Ketika masyarakat merasa terabaikan atau tidak puas dengan kebijakan tertentu, mereka dapat mengambil tindakan yang dapat memengaruhi arah kebijakan di masa depan. Protes atau gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan publik dapat mulai dari isu kecil namun berkembang menjadi gerakan yang lebih besar dan memiliki dampak yang signifikan pada sistem politik dan sosial.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur, Muchammad, Herru Prasetya Widodo, Asra Bulla Junga Jara Jara, Fathul Qorib, and Herru Prasetya Widodo Asra Bulla Junga Jara Jara Fathul Qorib. "Demonstrasi Mahasiswa 'Tolak Reformasi Dikorupsi' Dalam Agenda Media Tirto.Id." *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah* 11, no. 1 (2021): 13–28. <https://doi.org/10.35905/komunida.v11i01>.
- Agung, Sultan, Satrio Azhari, Asma Amaliyah, and M Psi Psikolog. "Menggali Asprasi Generasi Z : Persepsi Generasi Z Terhadap Citra Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )" 2, no. 01 (2024): 55–64. <https://doi.org/10.58812/sish.v2.i01>.
- Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani. "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–20. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.
- Aziz, Mohammad Rifqi. "Peran Dan Implementasi Dpr Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1308>.
- Dooley, Kevin J. "The Butterfly Effect of the 'Butterfly Effect.'" *Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences* 13, no. 3 (2009): 279–88.

<https://asu.elsevierpure.com/en/publications/the-butterfly-effect-of-the-butterfly-effect>.

Faliha Muthmainah. "Konsep Butterfly Effect Dalam Psikologi Positif." *Flourishing Journal* 2, no. 10 (2023): 656–62. <https://doi.org/10.17977/um070v2i102022p656-662>.

Febrina, Sylvia, and Lisman Manurung. "Penerapan E-Parlemen Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8, no. 2 (2022): 169–82. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556>.

Hermawan Usman, Atang. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014).

Humiati. "Peran Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Huku* 4, no. 2 (2022): 223–39. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i2.82>.

Inayah, Jastin Nurul, and Taufiq Nugroho. "Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 252. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>.

Junaidi, Veri, and Viola Reininda. "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *Jurnal JENTERA* 3, no. 1 (2020): 216–39. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.

Kodiyat, Benito Asdhie. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>.

Liu, Jizhao, Jing Lian, Julien Clinton Sprott, Qidong Liu, and Yide Ma. "The Butterfly Effect in Primary Visual Cortex." *IEEE Transactions on Computers* 71, no. 11 (2022): 2803–15. <https://doi.org/10.1109/TC.2022.3173080>.

Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.

Pielke, R.A., Bo-Wen Shen, and Xubin Zeng. "The Butterfly Effect: Can a Butterfly in Brazil Really Cause a Tornado in Texas?" *Weatherwise* 77, no. 3 (2024): 14–18. <https://doi.org/10.1080/00431672.2024.2329521>.

Riskiyono, Joko. "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.

S Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi)* 11, no. 1 (2019): 1–20.

Santoso, Gunawan, Restu M Hasbylah, Cholichul Hadi, Masduki Asbari, and Meilanta Rantina. "Butterfly Effect : Satu Hal Kecil Yang Merubah Hidup Sepenuhnya." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 3 (2023): 1–4. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i3.534>.

Silitonga, Tatar Bonar. "Tantangan Globalisasi, Peran Negara, Dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 1 (2020): 15–28. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271>.

Sujana, I Gede. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 7–13. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.41>.

Supryadi, Ady. "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 491–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.